



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563, FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559  
SITUS : www.kemenpppa.go.id

Nomor : B 1170 /Sesmen/ROUM/KP.06.03/09/2018 13 September 2018  
Lampiran : -  
Hal : Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di  
Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

Yth. Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris  
Daerah Provinsi  
di tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I yang dapat diikuti oleh PNS pusat dan daerah yang memenuhi persyaratan. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada laman <http://www.kemenpppa.go.id>.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat menginformasikan pengumuman dimaksud kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi Bapak/Ibu.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Kementerian Selaku Ketua  
Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya  
dan Pratama

Pria  
Marta Nur Sitepu



Daftar Undangan

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kementerian Keuangan;
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kementerian Perindustrian;
12. Kementerian Perdagangan;
13. Kementerian Pertanian;
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Kementerian Kesehatan;
19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
26. Kementerian Sekretariat Negara;
27. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
32. Kementerian Pariwisata;
33. Badan Pemeriksa Keuangan;
34. Kejaksaan Agung;
35. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
36. Sekretaris Kabinet;
37. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
38. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
39. Mahkamah Agung;
40. Badan Kepegawaian Negara;
41. Lembaga Administrasi Negara;
42. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;
43. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
44. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
45. Arsip Nasional RI;
46. Badan Informasi Geospasial;
47. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
48. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
49. Perpustakaan Nasional;
50. Badan Standarisasi Nasional;
51. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;



52. Pengawas Obat dan Makanan;
53. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
54. Provinsi Aceh;
55. Provinsi Sumatera Utara;
56. Provinsi Sumatera Barat;
57. Provinsi Riau;
58. Provinsi Jambi;
59. Provinsi Sumatera Selatan;
60. Provinsi Bengkulu;
61. Provinsi Lampung;
62. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
63. Provinsi Kepulauan Riau;
64. Provinsi DKI Jakarta;
65. Provinsi Jawa Barat;
66. Provinsi Jawa Tengah;
67. Provinsi DI Yogyakarta;
68. Provinsi Jawa Timur;
69. Provinsi Banten;
70. Provinsi Bali;
71. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
72. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
73. Provinsi Kalimantan Barat;
74. Provinsi Kalimantan Tengah;
75. Provinsi Kalimantan Selatan;
76. Provinsi Kalimantan Timur;
77. Provinsi Kalimantan Utara;
78. Provinsi Sulawesi Utara;
79. Provinsi Sulawesi Tengah;
80. Provinsi Sulawesi Selatan;
81. Provinsi Sulawesi Tenggara;
82. Provinsi Gorontalo;
83. Provinsi Sulawesi Barat;
84. Provinsi Maluku;
85. Provinsi Maluku Utara;
86. Provinsi Papua;
87. Provinsi Papua Barat.